

**PERANAN PEREMPUAN DALAM LEMBAGA EKSEKUTIF PADA DINAS
PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

Tri Anggraini¹, Serliana Tmanek², Aplonia Pala³, Anita Lassa⁴

Universitas Timor ^{1,2,3,4}
trianggraini1994@gmail.com¹

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui tugas pokok dan fungsi Peranan Perempuan dalam Dinas Perikanan Kabupaten Timor Tengah Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan atau menganalisis Peranan Perempuan dalam Lembaga Eksekutif di Dinas Perikanan Kabupaten Timor Tengah Utara. Perempuan memegang peranan penting dalam perumusan kebijakan di Dinas Perikanan Kabupaten TTU, Peranan perempuan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan sudah menjadi tugas dan tanggung jawab dinas sehingga yang menjabat sebagai penyelenggara selalu mendukung masyarakat kabupaten TTU secara maksimal sesuai dengan visi misi dinas, Peranan perempuan sebagai pelaksana administrasi sangat berperan penting dalam dunia kerja khususnya perkantoran agar pelaksanaan administrasi tidak melenceng dari koridor yang ada di instansi. Peranan perempuan sebagai pembina unit pelaksana juga sangat penting dalam dunia kerja, karena tanpa adanya pembina maka tugas yang dijalankan tidak terlaksana dengan baik. Simpulan, Peranan Perempuan sebagai pelaksana Administrasi sangat berperan penting dalam dunia kerja khususnya perkantoran, agar pelaksanaan administrasi tidak melenceng dari koridor yang ada dalam instansi. Pembina Unit pelaksana juga sangat penting dalam dunia kerja, karena tanpa adanya pembina maka tugas yang dijalankan tidak terlaksana dengan baik.

Kata Kunci: Dinas Perikanan TTU, Lembaga Eksekutif, Peranan perempuan

ABSTRACT

The research aims to determine the main duties and functions of the role of women in the Fisheries Service of North Central Timor Regency. The research method used is descriptive qualitative. This type of research is used to describe or analyze the role of women in executive institutions in the Fisheries Service of North Central Timor Regency. Women play an important role in formulating policies in the TTU District Fisheries Service. The role of women as administrators of government affairs has become the duty and responsibility of the department so that those who serve as administrators always support the TTU district community optimally by the vision and mission of the department. The role of women as administrators is very important. Plays an important role in the world of work, especially offices, so that administrative implementation does not deviate from the corridors of the agency. The role of women as supervisors of implementing units is also very important in the world of work because without supervisors the tasks they carry out will not be carried out well. In conclusion, the role of women as administrative implementers plays a very important role in the world of work, especially in offices, so that administrative implementation does not deviate from existing corridors within the agency. Implementing unit coaches are also very important in the world of work because without a coach the tasks carried out will not be carried out well.

Keywords: Executive Agency, Role Of Women, TTU fisheries service

PENDAHULUAN

Konsep peran mengacu pada apa yang dilakukan seseorang dalam organisasi atau masyarakat. Perilaku seseorang sebagai struktur sosial masyarakat penting juga dapat disebut peran. Dalam suatu kegiatan, Anda harus melakukan peran tanpa banyak berbicara. Menurut Anggraini & Agustian (2021); Raintung et al. (2021); Soekanto, (2002), menjalankan tugas adalah bagian dari keadaan yang selalu berubah.. Peran juga dapat didefinisikan sebagai kumpulan kegiatan atau perilaku tertentu yang dilakukan oleh suatu jabatan tertentu. Peranan adalah tindakan seseorang dengan cara tertentu dalam upaya menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dalam institusi tersebut. Seseorang dapat dianggap berperan jika ia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dalam institusi tersebut.

Perempuan adalah makhluk ciptaan Tuhan. Kamus Umum Bahasa Indonesia mengartikan wanita sebagai seorang perempuan (halus, atau putri) (Maymanah et al., 2023; Sianturi, 2020). Perempuan juga memiliki peranan dalam kehidupan sehari-hari. Perempuan juga memiliki peran penting dalam rumah tangga. Peran mereka sebagai ibu rumah tangga sangat penting karena mereka harus menjaga, menjaga, dan melaksanakan peran mereka sebagai pengatur dan pengurus keluarga. Di mana keluarga dapat dianggap sebagai struktur sosial oleh bagian masyarakat lainnya Namun, kebudayaan dan nilai masyarakat berubah karena tantangan baru yang tidak pernah ada sebelumnya.

Dalam pengamatan ini, eneliti melakukan penelitian tentang peran perempuan dalam lembaga eksekutif di Dinas Perikanan; perempuan sendiri harus dapat mempertahankan martabat, martabat, dan kehormatan saat melakukan tugas-tugas tersebut sambil mempertahankan sifat alami mereka sebagai perempuan. Perempuan yang bekerja untuk meningkatkan kemampuan atau keahliannya adalah perempuan karier (Nursyaidah, 2020; Thobroni, 2019). Karier sendiri didefinisikan sebagai kumpulan pekerjaan yang terkait dengan pekerjaan yang dilakukan seseorang sepanjang hidupnya (Mathis & Jackson, 2010). Menurut UU No.13 Tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun kebutuhan individu.

Perempuan banyak memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin. Namun, dua masalah yang paling sulit bagi mereka adalah memilih untuk tetap berada di rumah dan kekurangan pelatihan untuk kepemimpinan publik (Ernawati et al., 2022). Kedua masalah ini menunjukkan bagaimana perempuan terus dianggap sebagai warga negara kelas dua. Isu gender sering menjadi faktor yang menghalangi kemajuan karir kaum perempuan. Ini diperkuat oleh pendapat Dickson (2001), bahwa dalam lingkungan kerja di mana dominasi pria, jumlah pria dan wanita setara, atau dengan mayoritas wanita atau lingkungan seluruhnya wanita, masalah gender berdampak pada masyarakat, meskipun kita tidak selalu menyadarinya.

Organisasi atau badan yang bertujuan untuk melakukan usaha atau melakukan penyelidikan keilmuan disebut lembaga (Ernawati et al., 2022) . Menurut Noviati (2013), eksekutif adalah bagian pemerintahan yang bertanggung jawab atas penerapan undang-undang. Contoh paling umum dari cabang eksekutif adalah ketua pemerintahan. Administrasi, sistem presidensial, pemerintahan, dan sistem parlementer adalah beberapa contoh sistem eksekutif. Kata "eksekutif" berasal dari kata Latin "exécure", yang berarti "melakukan atau melaksanakan sesuatu". Dalam kebanyakan kasus, badan eksekutif bertanggung jawab atas eksekutif. Di negara demokratis, kepala negara, seperti raja atau

presiden, biasanya bertanggung jawab atas badan eksekutif; bagian eksekutif dalam arti yang luas juga terdiri dari sipil dan militer.

Lembaga eksekutif adalah salah satu lembaga pemerintahan yang memiliki otoritas dan tanggung jawab untuk menerapkan hukum (Rohmah, 2019; Zulkarnaen, 2020). Organisasi ini bertanggung jawab untuk melaksanakan undang-undang, menyelenggarakan urusan pemerintahan, dan menjaga tata tertib dan keamanan. Sistem organisasi eksekutif terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah sistem pemerintahan perlemen, yang terdiri dari pemimpin negara dan pemerintahan yang berbeda. Presiden bertanggung jawab atas kepala negara dan pemerintahan. Namun, sebagai simbol negara yang berdaulat, Pemimpin negara hanya berfungsi sebagai representasi. Kedua: Sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem ini, presiden berfungsi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dan parlemen tidak mengawasi langsung eksekutif.

Dalam pengimplemetasiannya perempuan mengalami kendala dalam menjalankan tugasnya yaitu: minimnya kesempatan yang di berikan. Faktor ini dipengaruhi karena faktor isu gender. Perempuan, harus mencapai dua kesuksesan yaitu sukses dalam mengurus tugas-tugas domestik dan sukses dalam kariernya. Konflik inilah yang mempengaruhi diri perempuan. Jadi, yang menjadi fokus penelitian penulis adalah Peranan perempuan dalam lembaga eksekutif di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten TTU dalam upaya menjalankan tugas Perempuan di dunia kerja.

Dalam penelitian ini, Peneliti memilih Dinas Perikanan Kabupaten TTU sebagai objek penelitian. Alasan peneliti memilih Dinas Perikanan karena kepala Dinas di Dinas Perikanan dan Kelautan Kab.TTU merupakan seorang perempuan. Tentu kondisi ini akan berdampak pada peranannya memiliki beban ganda. Beban ganda yang di maksudkan adalah mengurus tugas-tugas domestik sekaligus menjalankan tugas dikantor sebagai Kepala Dinas. Masalah yang melatarbelakangi penelitian ini adalah kepala dinas ternyata perempuan, padahal perempuan identik dengan pekerjaan domestik saja. Di lain sisi jumlah Sumber daya manusia Perempuan (SDM) sedikit, dibanding jumlah dengan laki-laki.

Berdasarkan data yang di peroleh Peneliti, Jumlah pegawai atau karyawan yang bekerja dalam Dinas Perikanan adalah 19 orang yang terdiri dari 6 orang perempuan dan 13 laki-laki. Berdasarkan data bahwa perempuan yang menjabat sebagai Kepala sangat sedikit karena di lihat dari segi jumlahnya perempuan yang menjabat sebagai kepala hanya 4 orang sedangkan laki-laki berjumlah 7 orang. Perempuan yang menjabat di Dinas Kelautan dan Perikanan berada pada posisi dan jabatan Kepala Dinas, Kasie Pengembangan Teknologi Perikanan Tangkap, Kasie Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya, dan Kasubag Keuangan dan Asset. Jika dilihat dari segi jumlahnya memang sangat sedikit dibandingkan dengan kuantitas laki-laki yang menjabat pada Dinas ini. Namun demikian, kuantitas antara laki-laki dan perempuan ini tidak dijadikan tolak ukur untuk mengukur peranan perempuan dilembaga eksekutif.

Oleh karenanya, peneliti tertarik meneliti mengetahui Tugas pokok dan fungsi peranan perempuan dalam Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Utara. Manfaat untuk masyarakat, memberikan informasi dan gambaran kepada seluruh masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara tentang pentingnya peran perempuan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. untuk pemerintah, memberikan informasi dan gambaran kepada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara agar dapat menjadi pertimbangan dalam menetapkan kebijakan terkait peran perempuan diwilayah pemerintahannya. bagi pegawai, dijadikan bahan masukan bagi pegawai dalam menjalankan tugasnya di Dinas Perikanan dan kelautan Kabupaten Timor Tengah Utara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif karena peneliti akan mengumpulkan dan menganalisis data empirik secara sistematis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami fenomena sosial yang sedang diteliti. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menentukan, menjelaskan, dan memperoleh pemahaman yang mendalam tentang arti dan mekanisme peran perempuan dalam lembaga eksekutif. (Pemerintahan) Kabupaten Timor Tengah Utara dimana peranan perempuan sebagai perumus kebijakan, perempuan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan, perempuan sebagai pelaksana administrasi dan perempuan sebagai pembina unit pelaksana.

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui studi lapangan dan kepustakaan. Hasilnya kemudian dianalisis dan diinterpretasikan untuk memberikan kesimpulan. Pedoman yang telah disiapkan peneliti digunakan untuk melakukan studi di lapangan, yang dilakukan melalui observasi dan wawancara. Karena proses penelitian kualitatif berbentuk siklus, pengumpulan dan analisis data dilakukan secara berurutan. Untuk memenuhi kebutuhan peneliti, informan dipilih secara *purposive*, artinya individu-individu yang memiliki pengetahuan yang cukup dan dapat menjelaskan keadaan sebenarnya. Peneliti juga menganalisis temuan wawancara melalui Proses pengumpulan data, pengurangan data, penyampaian data, dan penarikan kesimpulan terdiri dari empat tahap. Data pengumpulan dilakukan untuk mendapatkan data lapangan sebelumnya., reduksi data dilakukan untuk menyederhanakan data, dan penyajian data diberikan dalam bentuk tabel dan teks naratif. Penarikan kesimpulan dilakukan untuk memverifikasi dengan berpikir dan meninjau ulang catatan lapangan sebelumnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peranan perempuan tidak bisa dilepaskan dari aktifitas-aktifitas yang berkaitan dengan tugas-tugas domestik dan tugas dalam menjalankan kariernya. Perempuan biasanya dianggap lemah lembut, keibuan, dan emosional, sehingga mereka sesuai untuk mengerjakan tugas rumah tangga yang membutuhkan kesabaran. Selain mengerjakan tugas domestiknya perempuan juga bekerja di lembaga eksekutif. Perempuan bekerja di luar rumah dengan tujuan menunjang perekonomian keluarga. Perannya sama untuk laki-laki dan perempuan, dan orang-orang yang bekerja di sektor publik dianggap kuat, rasional, dan kuat.

Dalam penelitian ini, Penulis mengamati langsung terkait dengan Peranan Perempuan dalam lembaga eksekutif (Kepala Dinas Perikanan, Kasie pengembangan teknologi perikanan tangkap, kasie Sarana Prasarana Perikanan Budidaya, Kasubag Keuangan dan Asset). Jadi, yang berperan dalam lembaga eksekutif atau pemerintahan tidak hanya laki-laki melainkan perempuan juga berperan penting. Di dunia zaman sekarang perempuan di anggap lemah oleh laki-laki. Namun, yang terjadi saat ini pula yang bekerja di lembaga eksekutif atau pemerintahan adalah perempuan. Salah satu Lembaga Eksekutif yaitu Dinas Perikanan Kabupaten TTU yang di pimpin oleh Seorang perempuan. Dalam menjalankan tugas sebagai Kepala Dinas Perikanan tentunya memiliki Tupoksi yaitu: Membuat kebijakan teknis untuk perikanan budidaya, menetapkan program kerja untuk Dinas Perikanan sesuai dengan kebijakan teknis Dinas, dan memberikan penyuluhan dan pengembangan potensi di bidang perikanan dan kelautan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, perempuan harus mampu membangun basis dukungan yang tidak hanya berasal dari perempuan tetapi juga dari jenis kepemimpinan yang dapat menembus batas dan merangkul semua anak bangsa (Irmayani, 2022). Pada umumnya, di Indonesia, pembagian pekerjaan antara lelaki dan perempuan menggambarkan peran perempuan dalam masyarakat. Apabila perempuan mampu secara optimal dan sesuai dengan kodratnya, mereka memiliki peran yang sangat penting dalam lingkungan keluarga hingga perubahan skala nasional.

Dalam Dinas Perikanan Kabupaten Timor Tengah Utara, peranan-peranan perempuan sebagai berikut:

Perumus Kebijakan

Mengembangkan kebijakan yang efektif dan dapat diterima untuk mengatasi isu-isu dalam agenda politik disebut formulasi kebijakan. Perumusan kebijakan, menurut Dunn (2003); Hidayat (2019); Wahyono (2020), adalah jalur tindakan yang memungkinkan untuk dilakukan yang dapat membantu mencapai nilai-nilai dan memecahkan masalah kebijakan. Penulis mengetahui dari wawancara yang mereka lakukan bahwa proses perumusan kebijakan merupakan bagian penting dari pekerjaan sebagai Aparatur Sipil Negara. Dalam kasus perempuan di dinas perikanan, tugas menyusun kebijakan teknis pada umumnya dan di bidang sumber daya manusia, mengembangkan dokumen untuk memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas dukungan teknis pada Badan dan melaksanakan tugas resmi lainnya yang diberikan oleh badan.

Perumus kebijakan menjadi sangat penting dalam organisasi atau Dinas karena menjadi ujung tombak bagi kelancaran implementasi kebijakan dikemudian hari. Mengidentifikasi fenomena dan masalah-masalah dalam masyarakat menjadi Langkah awal yang seharusnya dapat dilakukan oleh seorang perumus kebijakan (Andhika, 2019; Bali, 2017). Di Dinas Perikanan, peran perumus kebijakan juga diambil peran oleh perempuan, pada dinas perikanan, perempuan juga berperan sebagai perumus kebijakan. pada kantor dinas perikanan, perempuan yang menjabat sebagai perumus kebijakan seperti kepala dinas, kasie sarana dan prasarana perikanan budidaya, kasie pengembangan teknologi perikanan tangkap, dan kasubag keuangan dan asset. oleh karenanya peran-peran awal dalam perumusan kebijakan juga dipegang oleh seorang perempuan yang berperan sebagai kasie sarana dan prasarana perikanan budidaya, dalam wawancara yang dilakukan penulis, Praxedia Yvoni De Antonia Lake mengungkapkan bahwa:

“Mengidentifikasi masalah dan penyusunan skala prioritas, perumusan (formulasi) rancangan kebijakan, penetapan dan pengesahan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan evaluasi kebijakan”.

Perumus kebijakan sangat di butuhkan dalam perkantoran agar pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan sesuai dengan plafon anggaran yang ada, dan agar lebih terarah pelaksanaannya. Ada sejumlah langkah dalam proses perumusan kebijakan publik, menurut (Dunn, 2003). Ini termasuk penyusunan agenda; pembuatan kebijakan; adopsi dan legitimasi kebijakan; pelaksanaan kebijakan; dan penilaian dan evaluasi kebijakan. Tugas pokok sebagai seorang perumus kebijakan adalah merumuskan kebijakan akan dijalankan unit/Dinas, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan. Kebijakan-kebijakan yang dirumuskan dalam Dinas Perikanan seperti anggaran tahunan dan perekrutan tenaga kerja. Hal ini senada yang disampaikan oleh Kasie Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya bahwa:

“Yang menjadi kebijakan dalam masa jabatan sebagai Kepala Dinas, saya merumuskan kebijakan seperti anggaran tahunan dan perekrutan tenaga kerja dalam Dinas Perikanan, agar lebih terarah pembangunan yang dilaksanakan dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan plafon anggaran yang ada”

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa perempuan sebagai perumus kebijakan dapat mendukung kelancaran urusan-urusan kantor sehingga dapat menghasilkan output yang baik. Jadi, yang menjabat sebagai perumus kebijakan dalam Dinas Perikanan Kabupaten TTU adalah Perempuan. Jadi, tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan di Dinas Perikanan karena semua bekerja sesuai tupoksinya masing-masing.

Penyelenggara urusan pemerintah

Dalam perspektif statistika, "pemerintah" didefinisikan sebagai lembaga atau badan publik yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan upaya untuk mencapai tujuan negara (Supandi et al., 2023; Susanto & Hairani, 2024). Di sisi lain, dalam perspektif dinamika, "pemerintahan" didefinisikan sebagai tindakan badan publik tersebut dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan nasional (Liunsili et al., 2017; Simorangkir et al., 2022). Pemerintahan dapat didefinisikan dalam arti luas, semua fungsi pemerintah, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Namun dalam arti sempit, governance mencakup kegiatan pemerintahan yang hanya mencakup sektor eksekutif saja.

Menjaga sistem ketertiban masyarakat sehingga dapat menjalankan kehidupan secara wajar adalah tujuan utama pembentukan pemerintahan (Jaya et al., 2021; Labolo, 2023; Lasahido, 2021). Selain itu, pemerintah modern pada dasarnya berfungsi untuk membantu masyarakat dengan menyediakan lingkungan yang memungkinkan setiap komunitas mengembangkan kapasitas dan inisiatif mereka untuk kemajuan bersama. Pemerintahan Indonesia terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintahan daerah (Abra, 2020). sebagaimana diatur dalam Konstitusi Republik Indonesia 1945, presiden republik Indonesia adalah orang yang memegang kekuasaan. sedangkan pemerintah daerah dan DPRD menyelenggarakan urusan pemerintah.

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, meningkatkan daya saing daerah, dan pemberdayaan peran masyarakat. Salah satu tujuan utama pembentukan pemerintahan adalah untuk memastikan bahwa masyarakat tetap dalam ketertiban sehingga mereka dapat menjalani kehidupan secara wajar. Dinas Perikanan memiliki wewenang untuk penyelenggaraan pemerintahan (Jaya et al., 2021; Supusepa, 2022; Vargholy et al., 2023).

Dinas Perikanan Kabupaten TTU mempunyai rencana kerja yang disusun sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dalam melayani masyarakat Kabupaten TTU secara maksimal sesuai dengan visi dan misi, artinya perempuan pada Dinas Perikanan Kabupaten TTU tidak pernah mengintervensi urusan-urusan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan kebijakan. Dinas Perikanan juga membuat perjanjian kinerja berjenjang

dalam tahun anggaran, dan membagi staf sesuai tugas pokok dan fungsi, seperti halnya dalam wawancara yang dilakukan penulis berikut ini:

“Verifikasi dan akuntansi pengelolaan keuangan Dinas, melaksanakan pengelolaan dan pembayaran gaji dan juga tunjangan pegawai, serta ada beberapa kegiatan di Dinas Perikanan yang sasarannya pad acara pengolahan dengan bahan baku ikan. Dinas Perikanan memiliki wewenang untuk meningkatkan taraf hidup nelayan, petani ikan, dan pengolahan hasil perikanan”

Terdapat dua jenis pembagian urusan pemerintah: dekonsentrasi dan pembantuan. Perangkat atau wakil pemerintah pusat di daerah dapat menangani urusan pemerintah pusat, sedangkan gubernur, yang dibantu oleh daerah atau desa, dapat menangani urusan pemerintah pusat yang bertentangan. Berdasarkan temuan penelitian peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa: yang menjadi urusan penyelenggara pemerintah bisa di atasi oleh perempuan dengan cara memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya pada pelayanan dan pembudidaya ikan secara optimal sehingga mencapai tujuan kesejahteraan. Hal ini terjadi karena perempuan dalam lembaga eksekutif di Dinas Perikanan sudah mengetahui tupoksinya masing-masing.

Pelaksanaan administrasi

Tindakan atau pelaksanaan rencana yang direncanakan dengan teliti disebut pelaksanaan (Darise & Bagou, 2019; Mamuja et al., 2021; Wowor et al., 2019). Sederhananya, pelaksanaan bias berarti penerapan. Pelaksanaan adalah tindakan atau upaya untuk menerapkan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan ini harus melengkapi semua persyaratan, termasuk siapa yang melakukan, di mana mulai, siapa yang melakukan, dan bagaimana harus dilakukan. Tidak ada pelaksana administrasi di kantor.

Pelayanan teknis administrasi seperti administrasi akademik, keuangan, kepegawaian, dan umum disediakan oleh unsur pelaksana administrasi. Tujuan administrasi menurut Sedianingsih et al. (2014), administrasi mempunyai tujuan antara lain: Mengamankan rahasia kantor atau organisasi dan Mengelola dan memelihara dokumentasi organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Administrator sangat di butuhkan dalam perkantoran agar kegiatan dalam perkantoran dapat berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Sesuai hasil wawancara, Narasumber mengatakan bahwa dalam menjalankan tugas sebagai administrator mengalami kendala misalkan dokumen yang ada kadang tidak sesuai dengan tupoksi, dan Pelayanan yang berbelit-belit. Oleh karena itu, sebagai Pelaksana administrasi perlu mengetahui tupoksinya. tupoksi yang di maksudkan adalah: menyusun agenda, membuat program kegiatan, membuat surat-menyurat.

“Administrator dapat dibutuhkan dalam perkantoran agar kegiatan dalam perkantoran bisa berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.”

Salah satu tujuan administrasi menurut Sedianingsih et al. (2014), Administrasi adalah mengelola serta memelihara arsip organisasi, yang membantu menjalankan fungsi manajemen seperti perencanaan, organisasi, penggerak, dan pengendalian. Berdasarkan hasil penelitian ini, Peneliti dapat memperoleh kesimpulan bahwa perempuan sebagai Pelaksana administrasi sangat penting dalam perkantoran sehingga yang berkaitan dengan rahasia-rahasia kantor dapat terjaga dan dokumen-dokumen penting tidak tercecer. Ada juga Pelaksana administrasi laki-laki dan perempuan pada Dinas Perikanan.

Jadi, tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan pada dinas karena semua bekerja sesuai dengan tugas masing-masing.

Pembinaan unit pelaksana

Pembinaan merupakan tindakan, proses, hasil, atau pernyataan yang lebih baik (Indra, 2020; Zahra et al., 2023). Ini menunjukkan bahwa beberapa kemungkinan telah berkembang, kemajuan, atau kemajuan dalam evolusi. Ada dua komponen pembinaan: pembinaan biasa berupa tindakan, proses, atau pernyataan tujuan, dan pembinaan biasa menunjukkan kepada perbaikan (Akbar et al., 2022; Mahaputra, 2022). Tugas Pembinaan unit pelaksana yaitu melaksanakan pengelolaan unit pelaksana teknis Dinas Perikanan dan Kelautan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa, Pembina unit Pelaksana sangat urgen dalam dunia kerja karena unit pelaksana bersentuhan langsung masyarakat. Sebagai Pembina harus tegas dalam membina unit pelaksana agar semua proses dalam pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan target. Sebagai Pembina unit pelaksana juga mengalami kendala dalam membina. Oleh karena itu, meninjau ulang kebijakan berdasarkan dialog/diskusi.

“Memberikan arahan dan saran, menyusun rencana kegiatan dan program unit pelaksana, bekerja sama dengan bidang-bidang lain untuk meningkatkan keberhasilan unit pelaksana. Sedangkan, Model pembinaan yang digunakan dalam membina seperti pembinaan disiplin, pembinaan karier dan pembinaan pendidikan dan pelatihan. Dari ketiga model pembinaan ini harus dipadukan sehingga dapat meningkatkan kualitas kerja pegawai Dinas Perikanan.”

Ada juga tugas- tugas pokok sebagai Pembina unit pelaksana yaitu menyusun rencana kegiatan dan program unit pelaksana, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Unit Pelaksana, dan memangkas prosedur pelaksanaan yang berbelit-belit, jika dalam perjalanan pembinaan unit pelaksanaan terhadap hambatan yang tidak dapat ditangani dengan baik, maka pimpinan akan berkomunikasi dengan pimpinan daerah untuk mencari solusi dalam menyelesaikan persoalan unit pembinaan tersebut. Hasil penelitian mengarah pada kesimpulan bahwa, dalam Dinas Perikanan juga memiliki Perempuan yang menjabat sebagai Pembina Unit Pelaksana. Pembina unit pelaksana sangat penting karena tanpa seorang pembina dalam perkantoran maka tugas yang dijalankan akan simpang siur atau tugas yang dijalankan tidak sesuai tujuan visi misi kantor.

SIMPULAN

Peranan Perempuan sebagai Perumus kebijakan Di Dinas Perikanan Kabupaten Timor Tengah Utara sudah menghasilkan kebijakan sehingga perempuan yang menjabat di Dinas Perikanan Kabupaten TTU bekerja sesuai dengan visi misi Dinas sehingga apa yang di harapkan dapat tercapai sesuai rencana atau target Dinas. Urusan pemerintah daerah khususnya di Dinas Perikanan sudah menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas sehingga yang menjabat sebagai penyelenggara khususnya Perempuan yang bergerak di bidang tersebut, selalu mendukung masyarakat Kabupaten TTU secara maksimal sesuai dengan visi dan misi Dinas. Peranan Perempuan sebagai pelaksana Administrasi sangat berperan penting dalam dunia kerja khususnya perkantoran, agar pelaksanaan administrasi tidak melenceng dari koridor yang ada dalam instansi. Pembina Unit

pelaksana juga sangat penting dalam dunia kerja, karena tanpa adanya pembina maka tugas yang dijalankan tidak terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abra, E. H. (2020). Ius Constituendum Penegakan Hukum Politik Uang Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.55108/Jbk.V2i1.229>
- Akbar, I. R., Nelsi, M., & Kristianti, L. S. (2022). Implementasi Gaya Mengajar Yang Menarik Guna Meningkatkan Minat Belajar Santri Pada Yayasan Hudatul Fallah Ciseeng Kabupaten Bogor. *Abdi Jurnal Publikasi*, 1(2), Article 2.
- Andhika, L. R. (2019). Pemodelan Kebijakan Publik: Tinjauan Dan Analisis Untuk Risalah Kebijakan Pemerintah. *Jurnal Riset Pembangunan*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.36087/Jrp.V2i1.45>
- Anggraini, T., & Agustian, D. (2021). Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Upaya Pencegahan Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan (Karhutla) Di Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 41–46. <https://doi.org/10.33701/Jkp.V4i1.1510>
- Bali, M. M. E. I. (2017). Model Interaksi Sosial Dalam Mengelaborasi Keterampilan Sosial. *Pedagogik: Jurnal Pendidikan*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.33650/Pjp.V4i2.19>
- Darise, M. I., & Bagou, U. (2019). Pengelolaan Budidaya Rumput Laut Di Desa Popalo Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.37606/Publik.V6i2.13>
- Dickson, A. (2001). *Wanita Di Tempat Kerja Anne Dickson ; Alih Bahasa A.Reni Eta*. Jaklitera. <https://perpustakaan.jakarta.go.id/book/detail?cn=jakpu-11120000003903>
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (2nd Ed.). Ugm Press. <https://ugmpress.ugm.ac.id/id/product/ekonomi-bisnis/pengantar-analisis-kebijakan-publik>
- Ernawati, E., Febrian, V. R., Fazis, M., & Syam, H. Y. (2022). Analysis Of Women's Leadership Role In Gender Perspective In Work Training Centers (Blk) Batusangkar. *Agenda: Jurnal Analisis Gender Dan Agama*, 4(2), Article 2.
- Hidayat, E. S. (2019). Analisis Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(4), Article 4. <https://doi.org/10.25157/Dinamika.V5i4.1741>
- Indra, A. (2020). Pengaruh Pemberdayaan Dan Pembinaan Terhadap Komitmen Organisasional Di Pt. Bank Sumut Tbk. Cabang Medan. *Ecobisma (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen)*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.36987/Ecobi.V7i1.1552>
- Irmayani, T. (2022). *Partisipasi Milenial Dalam Dinamika Politik*. Jejak Pustaka.
- Jaya, D. P., Aprianto, S., & Erwan, E. (2021). Effectiveness Of Regional Regulation Of Livestock Number 19 Of 2007 Concerning Maintenance And Control Of Livestock (Study Of Lawang Agung Village, Seluma Regency). *Jurnal Hukum Sehasen*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.37676/Jhs.V7i1.2045>
- Labolo, M. (2023). *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Pt. Rajagrafindo Persada - Rajawali Pers.

- Lasahido, A. A. (2021). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Di Kota Depok Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Renaissance*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.53878/Jr.V6i2.153>
- Liunsili, H., Kimbal, M., & Sumampow, I. (2017). Kebijakan Pemerintah Kota Bitung Dalam Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Puskesmas Kecamatan Lembeh Utara. *Jurnal Eksekutif*, 1(1), Article 1. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/16414>
- Mahaputra, M. R. (2022). Pembinaan Keterampilan Sosial Siswa Oleh Guru Dalam Pembelajaran Ppkn Di Smp N 10 Padang. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 3(1), 29–37. <https://doi.org/10.38035/Jihhp.V3i1.1386>
- Mamuaja, J., Kawatu, F. S., & Kambey, A. (2021). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Di Desa Sea Satu Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. *Jurnal Akuntansi Manado (Jaim)*, 249–258. <https://doi.org/10.53682/Jaim.V2i2.1221>
- Mathis, R. L., & Jackson, J. H. (2010). *Human Resource Management*. Cengage Learning.
- Maymanah, Q., Priyadi, A. T., & Wartiningsih, A. (2023). Formasi Ideologi Dalam Novel Ksatria, Putri, Dan Bintang Jatuh Karya Dee Lestari. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni*, 1(4), Article 4. <https://doi.org/10.47233/Jishs.V1i4.1169>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis*. Sage.
- Noviati, C. E. (2013). Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), Article 2. <https://doi.org/10.31078/Jk1027>
- Nursyaidah, N. (2020). Bentuk Pemberdayaan Wanita Karier Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadist. *Darul Ilmi: Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.24952/Di.V7i2.2243>
- Raintung, A., Sambiran, S., & Sumampow, I. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. *Governance*, 1(2), Article 2. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/view/35369>
- Rohmah, E. I. (2019). Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia, Iran, Dan Perancis. *Ummul Qura Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (Insud) Lamongan*, 13(1), Article 1. <https://doi.org/10.55352/Uq.V13i1.413>
- Sedianingsih, S., Soetanto, N. P., & Mustikawati, F. (2014). *Teori Dan Praktik Administrasi Kesekretariatan*. Prenada Media.
- Sianturi, T. O. P. (2020). Wanita Sebagai Pendeta Menurut Teologia Lutheran Dan Hubungannya Dengan Hak Azasi Manusia. *Jurnal Pokok Anggur*, 2(1), Article 1.
- Simorangkir, T. T., Pioh, N. R., & Kimbal, A. (2022). Implementasi Kebijakan Program Generasi Berencana Di Kantor Perwakilan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Utara. *Governance*, 2(1), Article 1. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/view/38104>
- Soekanto, S. (2002). *Teori Peranan*, Jakarta: Bumi Aksara. *Spredley, James*, 2007.
- Supandi, D., Wasistiono, S., Madjid, U., & Pitono, A. (2023). Implementasi Kebijakan Gerakan Membangun Desa Di Provinsi Jawa Barat. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(5), Article 5. <https://doi.org/10.35931/Aq.V17i5.2697>

- Supusepa, D. (2022). Principles Of Good Governance According To Law Number 32 Of 2004. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, 2(1), 12–29. <https://doi.org/10.46924/jihk.v2i1.130>
- Susanto, Y., & Hairani, W. (2024). Evaluasi Kebijakan Pemerintahan Daerah Provinsi Bengkulu Melalui Renja Tahun 2016-2021 Dalam Peningkatan Pariwisata Studi Kasus Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu. *Jurnal Stia Bengkulu : Committe To Administration For Education Quality*, 10(1), Article 1. <https://doi.org/10.56135/jsb.v10i1.130>
- Thobroni, A. (2019). Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir). *Al-Fikri: Jurnal Studi Dan Penelitian Pendidikan Islam*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.30659/jspi.v2i1.4016>
- Vargholy, M. N., Rifan, M., Sajidin, S., & Rahmawati, L. (2023). “Kotak Kosong” Bernama Paket Paralel Perizinan: Sebuah Content Analysis Kewenangan Perizinan Oleh Pemerintah Daerah Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. *Risalah Hukum*, 20(2), Article 2.
- Wahyono, H. & S. (2020). Budaya Paternalistik Dalam Perumusan Kebijakan Publik (Mempertegas Integritas Perumus Kebijakan Di Kabupaten Pamekasan). *Jurnal Yustitia*, 21(2), Article 2. <https://doi.org/10.53712/yustitia.v21i2.1016>
- Wowor, M., Singkoh, F., & Waworundeng, W. (2019). Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Kamanga Kecamatan Tompaso. *Jurnal Eksekutif*, 3(3), Article 3. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/27041>
- Zahra, A., Putri, V. A., Sari, M. F. D., & Rahmawati, D. (2023). Pembinaan Disiplin Kerja Anggota Polri Di Polsek Koto Tangah Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat. *Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research And Development*, 6(1), 64–71. <https://doi.org/10.38035/rj.v6i1.796>
- Zulkarnaen, Z. (2020). Kemitraan Antara Eksekutif Dan Legislatif Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 8(2), Article 2. <https://doi.org/10.25157/justisi.v8i2.4070>